

**Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*
(Studi Empiris pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten)**

*The Effect of E-Procurement Implementation, Internal Control of Preventing Fraud
(Empirical Study on PT. PLN (Persero) Distribution West Java and Banten)*

Mahardika Lintangari¹, Dini Wahyu Hapsari², Eddy Budiono³

¹Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University

¹mahardikalintangari@gmail.com, ²dinihapsari@telkomuniversity.ac.id, ³budiono.eddy@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *e-procurement*, sistem pengendalian internal, dan pencegahan *fraud* di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi *e-procurement*, dan sistem pengendalian internal baik secara simultan maupun parsial terhadap pencegahan *fraud* di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif bersifat kausal dan termasuk dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, dengan sampel pegawai bagian pengadaan barang dan jasa. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuisioner. Data dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, pengujian validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis linier berganda, dan pengujian hipotesis dengan menggunakan bantuan *software SPSS 24*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement*, pengendalian internal dan pencegahan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten tergolong baik. Berdasarkan pengujian hipotesis, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap pencegahan *fraud*. Secara simultan, implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Kata kunci : implementasi *e-procurement*, pengendalian internal, pencegahan *fraud*

Abstract

This study aims to determines how the implementation of e-procurement, internal control system, and prevention fraud in PT.PLN (Persero) Distribution West Java and Banten and also to discover how the effect of the implementation of e-procurement, internal control, either simultaneously or partially, for prevention fraud in PT.PLN (Persero) Distribution West Java and Banten.

Based on the research objective, the research method used in this study is a causally descriptive study, which is also included in the quantitative research. This research is conducted in PT.PLN (Persero) Distribution West Java and Banten, with the research sample of employees of goods and services procurement. The research data used in this study is primary data, which is collected by using questionnaire. The research data is analyzed by using descriptive statistical analysis, validity and reliability test, classic assumption test, multiple linear regression analysis, and hypothesis test by using SPSS 24 software.

The result of the study shows that the implementation of e-procurement, internal control system, and prevention fraud in PT.PLN (Persero) Distribution West Java and Banten are in a good category. Based on the hypothesis test, the result shows that the implementation of e-procurement, and internal control, partially has significant effect for prevention fraud. Simultaneously, the implementation of e-procurement, and internal control significantly effects for prevention fraud in PT. PLN (Persero) Distribution West Java and Banten.

Keyword : implementation of *e-procurement*, internal control, and prevention *fraud*

1. Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa dinilai sebagai masalah yang krusial, terbukti dengan ditemukannya kasus-kasus penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Besarnya jumlah pinjaman yang disediakan pemerintah kepada PT. PLN (Persero) dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa bisa menjadi titik awal terjadinya *fraud*. Untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya perbaikan mutu dalam proses pengadaan barang dan jasa serta peningkatan pengendalian.

Berdasarkan kasus tersebut diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan implementasi *e-procurement*, pengendalian internal dan pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.
2. Mengetahui besarnya pengaruh implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten secara simultan.
3. Secara parsial :
 - a) Mengetahui besarnya pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten secara parsial.
 - b) Mengetahui besarnya pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten secara parsial.

2. Dasar Teori dan Metodologi

Pengertian *E-Procurement*

Sutedi^[22] mengemukakan bahwa *E-procurement* sebagai sebuah *website* yang merupakan sistem lelang dalam pengadaan barang/jasa oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet.

Komponen *E-procurement*

1. Tahapan Pelaksanaan *E-Procurement*

Berikut ini adalah tahapan *e-procurement* menurut Sutedi^[22], yaitu :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Persiapan pengadaan | 6) Proses evaluasi |
| 2) Pengumuman pelelangan | 7) Lelang gagal dan pelelangan ulang |
| 3) Pendaftaran peserta lelang | 8) Pengumuman calon pemenang lelang |
| 4) Penjelasan pelelangan | 9) Sanggah |
| 5) Penyampaian penawaran | 10) Pasca pengadaan |

2. Metode Pelaksanaan *E-procurement*

Menurut Willem^[18] dalam kegiatan *e-procurement* terdapat empat metode pelaksanaan dari *e-procurement*, yaitu :

- 1) *e-Tendering*
- 2) *e-Bidding*
- 3) *e-Catalogue*
- 4) *e-Purchasing* tata cara pembelian barang dan jasa melalui sarana *e-Catalogue*.

Pengertian Pengendalian Internal

The Committee on Sponsoring Organization of the Treadway Commission menyatakan bahwa pengendalian internal tidak lagi dipandang sebagai suatu struktur tetapi sebagai suatu proses untuk meyakinkan bahwa kegiatan operasi organisasi dapat mencapai tujuannya dalam lingkungan organisasi yang semakin dinamis.

Komponen Pengendalian Internal

- 1) *Control Environment*
- 2) *Risk Assesment*
- 3) *Control Activities*
- 4) *Information and Communication*
- 5) *Monitoring*

Pengertian *Fraud*

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* *fraud* dalam arti luas mencakup segala bentuk perbuatan kriminal dan kejahatan untuk memperoleh keuntungan yang menggunakan tipu muslihat dan kecurangan sebagai modus operandi utamanya^[3].

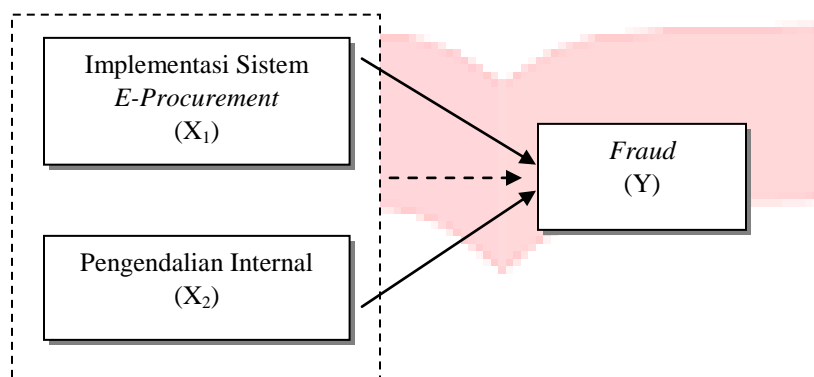
Komponen Pencegahan *Fraud*

- 1) Memperkuat kerangka hukum
- 2) Prosedur transparan

- 3) Membuka dokumen tender
 - 4) Evaluasi Penawaran
 - 5) Melimpahkan Wewenang
 - 6) Pemeriksaan dan Audit Independen
- Berikut ini gambar kerangka pemikiran :

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran



Keterangan

- > Parsial
- - - - -> Simultan

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono^[21] menyatakan metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan tujuan studi penelitian deskriptif.

Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono^[21] adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel, menggunakan instrumen penelitian dalam pengumpulan data, data bersifat kuantitatif berbentuk angka atau statistik, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Tujuan studi penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian terhadap masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Untuk menerapkan metode ilmiah dalam penelitian maka di perlukan suatu desain penelitian, menurut Arikunto^[2] desain penelitian adalah rencana atau rancangan yang di buat oleh peneliti, sebagai ancar-ancar kegiatan yang akan di laksanakan.

Penelitian ini menggunakan desain kausalitas, tujuannya yaitu untuk mendapatkan bukti hubungan sebab akibat, jadi di sini ada variabel independen (mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi). Dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan intervensi data dan juga merupakan penelitian yang tidak diatur, karena terjadi secara alamiah di lapangan. Dari sisi dimensi waktu pelaksanaan digolongkan sebagai Studi *Cross-Sectional* atau *one shot* yaitu studi yang dilakukan dengan sekali mengumpulkan data; periode harian, mingguan, bulanan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Unit analisis yang digunakan peneliti adalah organisasi yaitu bagian pengadaan barang dan jasa di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat.

3. Pembahasan

Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan pada kuisioner maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi *E-Procurement* di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten tergolong baik, dengan presentase sebesar 80,68%. Implementasi *E-Procurement* yang tergolong baik tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alat dalam mencegah *fraud* pada divisi pengadaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan pada kuisioner dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Internal di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten tergolong baik, dengan presentase sebesar 81,42%. Hal ini berarti pengendalian internal telah memenuhi kriteria dan kualifikasi yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi, serta pemantauan.

Berdasarkan hasil jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan pada kuisioner dapat disimpulkan bahwa Pencegahan *Fraud* di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten tergolong baik, dengan presentase sebesar 81,17%. Hal ini berarti pencegahan *fraud* telah memenuhi kriteria dan kualifikasi yaitu memperkuat kerangka hukum, prosedur transparan, membuka dokumen tender, evaluasi penawaran, melimpahkan wewenang serta pemeriksaan dan audit independen.

Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan, diperoleh bahwa Implementasi *E-Procurement*, dan Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* pada Divisi Pengadaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dengan nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi atau baik Implementasi *E-Procurement* dan Pengendalian Internal maka semakin baik pula Pencegahan *Fraud* pada Divisi Pengadaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Berdasarkan pengujian secara parsial, diperoleh bahwa : Implementasi *E-Procurement* secara parsial berpengaruh signifikan menuju kearah positif terhadap Pencegahan *Fraud* pada Divisi Pengadaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dengan nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu 0,047. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik Implementasi *E-Procurement* meliputi semakin baiknya tahapan serta metode *e-procurement* maka semakin baik Pencegahan *Fraud* pada Divisi Pengadaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. Kemudian, Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Pencegahan *Fraud* pada Divisi Pengadaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dengan nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik Pengendalian Internal meliputi semakin baiknya kelima indikator pengendalian internal; lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi serta pemantauan, maka semakin baik pula Pencegahan *Fraud* pada Divisi Pengadaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Pengaruh Implementasi *E-Procurement* dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud* pada Divisi Pengadaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten”, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi *e-procurement*, pengendalian internal, dan pencegahan *fraud* Divisi Pengadaan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten dikatakan baik, dan terdapat pengaruh signifikan positif antara variabel Implementasi *E-Procurement* dan Pengendalian Internal terhadap variabel Pencegahan *Fraud* baik secara simultan maupun parsial

Saran

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah menggunakan objek penelitian yang berbeda, menambahkan atau menggunakan variabel lain untuk diuji, terutama variabel yang tidak terdapat dalam penelitian ini, seperti GCG, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data tidak hanya menggunakan kuisioner namun dapat ditambah dengan melakukan wawancara.

Daftar Pustaka :

- [1] Arfah, E. A. (2011). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Implikasinya pada Kinerja Keuangan. *Jurnal Investasi Vol. 7 No. 2*
- [2] Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- [3] Audit, Yayasan Pendidikan Internal. (2015). *Fraud Risk and Control*. Jakarta: Graha Sucofindo.

- [4] Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- [5] Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [6] Hermiyeti. (2010). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang. *Jurnal STEKPI Jakarta* .
- [7] Holtfreter, K. (2005). Fraud in US Organizations : an examination control mechanisms. *Journal of Financial Crime* .
- [8] Imam Agus Faisol, T. d. (2014). Pengaruh Penerapan E-Procurement terhadap Pencegahan Fraud di Sektor Publik. *JAFFA Vol. 02 No.2* , 71-90.
- [9] Kishor Vaidya, A. S. (2006). Critical Factor that Influence E-Procurement Implementation Success in The Public Sector. *Journal of Public Procurement, Vol. 6 Issues 1&3* , 70-99.
- [10] Luh Putu Resti Mega Artanti, L. H. (2016). Peran E-Procurement terhadap Pencegahan Fraud pada Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Daerah Pulau Lombok. *NeO-Bis Vol. 10*
- [11] Moh. Risqi Kurnia Adi, K. A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan (Fraud) pada Sektor Pemerintahan. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan Vol. 10* .
- [12] Nuryanti, D. R. (2015). Pengaruh Implementasi E-Procurement dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *Repository UNPAS* .
- [13] Joseph, N. Oguda (2015). *Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega Country. International Journal of Business and Mmanagement Invetion* .
- [14] Pope, J. (2007). *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [15] Rahmawan Satriyo Nugroho, A. H. (2015). Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement) terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 3 No. 1* , 1905-1911.
- [16] Sambas Ali Abdurrahman, M. d. (2011). *Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial-Administrasi-Pendidikan)*. Bandung: Pustaka Setia.
- [17] Schooner, C. R. (2007). Incrementalism : Eroding the Impediments to a Global Public Procurement Market. *Journal of GW Law Faculty Publication & Other Works* .
- [18] Siahaya, W. (Manajemen Pengadaan : procurement manajemen). 2012. Bandung: Alfabeta.
- [19] Singleton, T. (2002). Stop Fraud Cold with Powerful Internal Control. *The Journal of Corporate Accounting & Finance* .
- [20] Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [21] Sugiyono. (2013). *Metode Peneltian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- [22] Sutedi, A. (2008). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [23] Tuanakotta, T. M. (2014). *Audit Berbasis ISA*. Jakarta: Salemba Empat.
- [24] _____ . (2003). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta.

- [25] _____. (2006). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta.
- [26] _____. (2008). Peraturan Menteri Negeri Badan Usaha Milik Negara Nomor 05 Tahun 2008 Tentang *Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta.
- [27] _____. (2010). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta.
- [28] _____. (2012). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta.
- [29] _____. (2012). Peraturan Menteri Negeri Badan Usaha Milik Negara Nomor 15 Tahun 2012 Tentang *Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara*. Jakarta.
- [30] _____. (2015). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta.
- [31] AICPA. (2013). Diakses Mei 28, 2017, dari *American Institute of Certified Public Accountant*: <http://www.aicpa.org/PUBLICATIONS/INTERNALCONTROL>
- [32] COSO. (2013, Mei 14). Diakses Mei 26, 2017, dari *COSO Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission*: <https://www.coso.org>
- [33] International, T. (2017, Januari 4). Diakses Januari 24, 2017, dari *Transparency International (Corruption Perception Index)*: <http://ti.or.id/cpi/2015>
- [34] KEMENKEU. (2016, Desember). *APBN 2017*. Diakses Januari 25, 2017, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <http://www.kemenkeu.go.id>
- [35] KPK. (2016, Desember 30). Diakses Januari 2017, 24, dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi): <https://acch.kpk.go.id>
- [36] PLN, PT. (2000, Juli 24). Diakses Januari 25, 2017, dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten: <http://www.pln.co.id/disjabar>